PERAN KOMITE AUDIT DALAM MENINGKATKAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA PT DIRGANTARA INDONESIA (Persero) BANDUNG

***The Role Of Audit Committee In Improving The Implementation Principles Of Good Corporate Governance* (GCG) *At* PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung**

ABSTRACK

One condition the implementation of Good Corporate Governance in BUMN *or public companies is the existence of the Audit Committee, particularly for* BUMN *is a must, in accordance with the decision of the Minister of State Number*: Kep -117 / 2002 *on the implementation of Good Corporate Governance. Hopefully, by the more effective the audit committee of commissioners duties of companies in the implementation and oversight of corporate governance in companies, so that the vision, mission and objectives can be achieved with good company. The purpose of this study is to determine whether the audit committee role in improving the implementation of Good Corporate Governance in* PT Dirgantara Indonesia (Persero)*.*

The method used in this research is descriptive and verification method with quantitative approach. The unit of analysis in this study is an audit committee and Good Corporate Governance in PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung*. Data collection methods used were saturated sample of* 30 *respondents. To determine the role of audit committees in improving the implementation of the principles of Good Corporate Governance, which used statistical analysis using correlation analysis, linear regression, coefficient of determination, and hypothesis testing using t test, with the help of software* SPSS 12.0 *for Windows.*

The results qualitatively show that the audit committee has been quite good, so it is with good corporate governance is good enough, and the results of quantitative research shows the role of audit committees in improving the implementation of the principles of Good Corporate Governance was 54.3%*, and the remaining amount other variables explained* 45.7% *excluding the audit committee variables, such as commissioners, directors, officers, employees and external parties.*

Keywords: Audit Committee, the Principles of Good Corporate Governance, Good Corporate Governance

I. PENDAHULUAN

Dunia bisnis di Indonesia mengalami kemunduran setelah terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Dampak yang ditimbulkan dari krisis tersebut diantaranya adalah terjadinya likuidasi perbankan dan tidak sedikit perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Dampak lainnya yang terjadi dari krisis tersebut menunjukkan banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai tidak dibangun diatas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dampak krisis ekonomi juga dirasakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu penggerak perekonomian bangsa, dimana BUMN mengalami penurunan kinerjanya. Selain kinerja keuangan yang menurun, penjualan masing-masing produk BUMN pun mengalami penurunan.

Dari sekian banyak perusahaan, hanya perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang dinilai lebih siap melaksanakan *Good Corporate Governance*. Lantas mengapa justru BUMN yang dipandang lebih siap untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* dibandingkan dengan perusahaan swasta, BUMN dinilai berhasil melakukannya penertibannya sejak tahun 1995 dan itu menjadikannya fleksibel. Dimulai Keppres No. 171 tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dijadikan dasar yang kemudian diteruskan dengan Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (No.KEP-23/M-PBUMN/2000) tanggal 31 Mei 2000 tentang pengembangan praktek *Good Corporate Governace* dalam perusahaan (BUMN), dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek-praktek *Good Corporate Govenance*.

Maka PT Dirgantara Indonesia (Persero) harus melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Salah satu prasyarat pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BUMN dan perusahaan publik adalah keberadaan komite audit, seperti yang tertuang dalam pasal (2) ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/M-MBU/2002

bahwa Komisaris/Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam bidang *corporate governance*, komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan melakukan pengawasan efektif terhadap benturan atau potensi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan.

Maka PT Dirgantara Indonesia (Persero) harus melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Salah satu prasyarat pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BUMN dan perusahaan publik adalah keberadaan komite audit, seperti yang tertuang dalam pasal (2) ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/M-MBU/2002 bahwa Komisaris/Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam bidang *corporate governance*, komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan melakukan pengawasan efektif terhadap benturan atau potensi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka dasar hukum di Indonesia perusahaan-perusahaan publik diwajibkan untuk membentuk komite audit. Komite audit tersebut dibentuk oleh dewan komisaris. Oleh karena itu, semua perusahaan manufaktur publik merupakan perusahaan milik masyarakat luas. Bahkan, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari di luar bursa efek juga terkena kewajiban untuk membentuk komite audit. Di dalam perusahaan, komite audit sangat berguna untuk menangani masalah-masalah yang membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan permsalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat teratasi.

Pengertian komite audit menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/MBU/2002 adalah sebagai berikut:

“Komite Audit adalah suatu badan yang dibawah komisaris yang sekurang-kuranngya minimal satu orang anggota komisaris dan dua orang ahli yang bukan merupakan pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnnya maupun pelaporannya dan bertanggungjawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas”.

Dari pengertian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya yang anggotanya minimal satu orang komisaris dan dua orang ahli yang bukan berasal dari pegawai BUMN yang bersangkutan yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris.

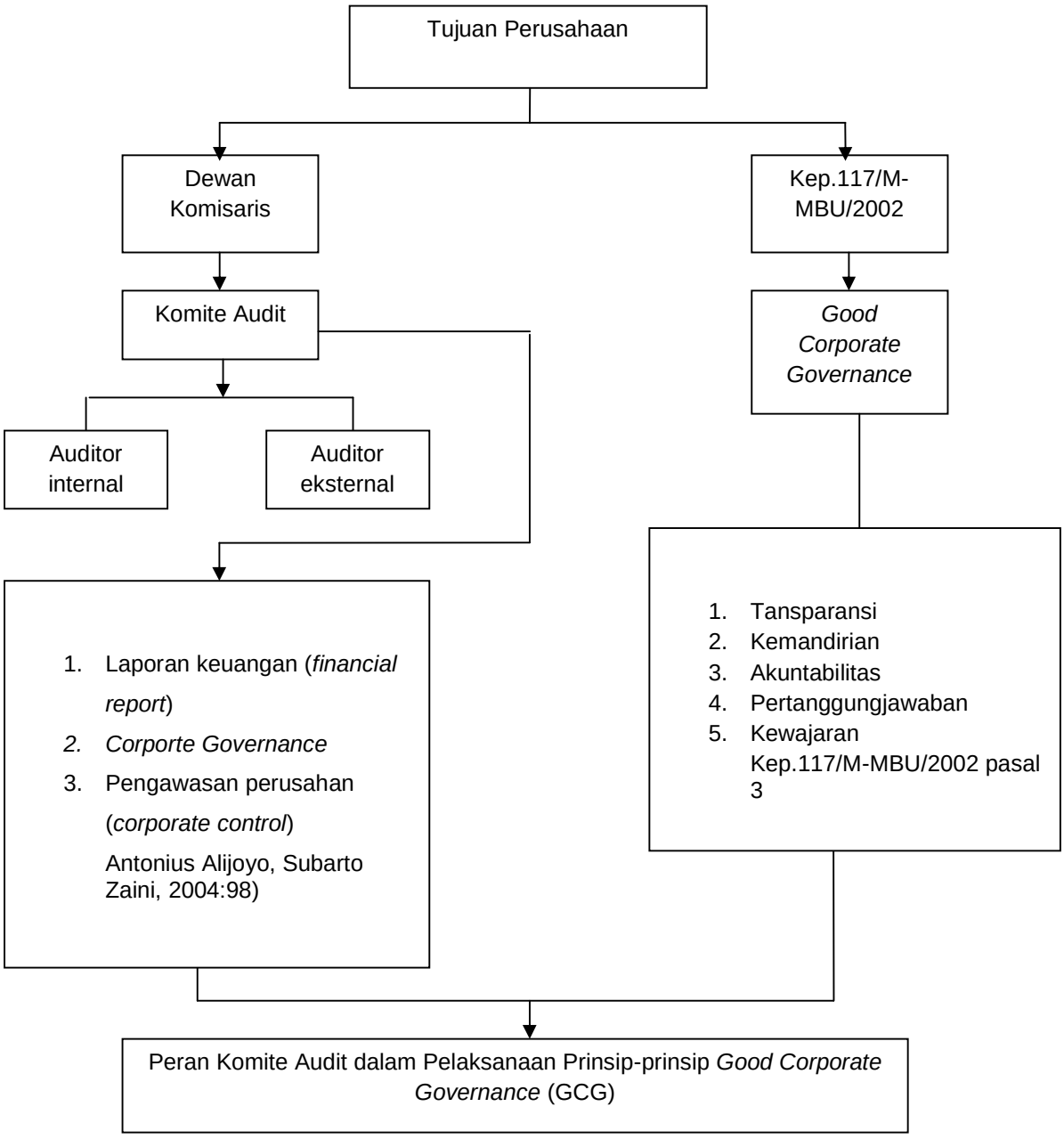
Tujuan komite audit Menurut Kep. Men 117/2002 adalah membantu dewan komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.

Menurut program *World Bank* dan *UNDP*, organisasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, menghindarkan salah alokasi dengan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha. *Good Corporate Governance* (GCG) sendiri merupakan sebuah konsep yang populer dan merupakan sebuah istilah dan gerakan yang hangat dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai sebuah konsep yang makin populer, GCG ternyata tak memiliki definisi tunggal.Dikalangan bisnis, istilah GCG diartikan tata kelola perusahaan.Beberapa mendefinisikan GCG dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah.

Pengertian *Good Corporate Governace* (GCG) menurut Mas Achmad Daniri (2005:8) dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance*: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia adalah sebagai berikut:

> “*Good Corporate Governace* (GCG) di definisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara kesinambungan dalam jangka panjang, dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan norma yang berlaku”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governace* merupakan pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan dalam perusahaan yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangan yang dapat membantu tercapainya kesinambungan perusahaan melaui pengelolaan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good corporate governance*.



III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah komite audit dan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Dirgantara Indonesia (Persero). Maka yang akan diteliti adalah komite audit dan mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada PT. Dirgantara Indonesia pada divisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Komite Audit yang berlokasi di Jl. Padjadjaran No. 154 Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian.

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrument penelitian
7. Kesimpulan.”

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3.3
Overasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Ukuran	Skala	No Kuisioner
Komite Audit (X)	“Komite Audit adalah komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen”. (FCGI, 2002:11)	Komite audit melakukan pengawasan yang efektif terhadap: 1. Pengawasan Laporan keuanagan (*Financial report*) *2.* Pengawasan *Corporate Governance*	1. Kondisi keuangan perusahaan 2. Hasil usaha perusahaan 3. Rencana dan komitmen jangka panjang 1. Menilai kebijakan 2. Memonitor proses pengendalian	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal	1-3

		3. Pengawasan Perusahaan (Antonius Alijoyo, Subarto Zaini 98-99:2004)	3. Memeriksa kasus-kasus penting 4. Memeriksa laporan 1. Pemahaman tentang resiko 2. Sistem pengendalian intern 3. Pemantauan proses pengawasan (Antonius Alijoyo, Subarto Zaini 98-99:2004)	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal	4-7 8-10
Prinsip-prinsip GCG (Y)	"*Good Corporate Governance* adalah Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan kepentingan *stake holders* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika". (KEP-117/M-MBU/2002 pasal 1)	Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*: 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Responsibilitas 4.Indenpendensi 5. Kewajaran (KEP-117-MBU/2002 pasal 3)	1. Menyediakan informasi 2. Kebijakan perusahaan harus tertulis 3. Prinsip keterbukaan 1. Mempunyai kompetensi 2. Sisitem pengendalian internal 3. Memiliki ukuran kinerja 1. Kepatuhan 2. Tanggungjawab sosial *3.* Melindungi pemegang saham dan *stakeholders* 1. Profesional 2. Benturan kepentingan dan pengaruh 3. elaksanakan fungsi dan tugas	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal	1-3 4-6 7-9 10-12 13-15

			1. Memberikan kesempatan 2. Perlakuan setara dan wajar 3. Hak-hak karyawan (Moh. Wahyudin Zarkasyi 39-41: 2008)		

3.2.3 Sumber dan Teknik Penentuan Data

3.2.3.1 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.2.3.2. Teknik Penentuan Data

1. Populasi

Pada penelitian ini penulis mengambil populasi sebanayak 17 orang pada bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan 13 orang pada bagian Komite Audit. Sehingga jumlah populasi yang diambil adalah sebanyak 30 orang.

2. Sampel

Dalam penelitian ini karena jumlah populasinya sedikit (terbatas) sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sampel, sehingga penulis mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi atau disebut dengan sensus yaitu 30 orang pada bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Komite Audit.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan diteliti terdiri dari berbagai sumber yaitu dilakukan dengan cara:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Sehubungan dengan tingkat pengukuran untuk variabel X (Komite Audit) dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal dan variabel Y (Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*) berskala ordinal, maka data variabel X dan Y tersebut harus ditransformasikan untuk menaikkan tingkat pengukuran dari skala ordinal ke skala interval. Teknik yang digunakan untuk menaikkan data tersebut adalah MSI *(Method of Succesive Intervals)* atau disebut metode interval berurutan. Teknik tersebut merupakan teknik yang paling sederhana dalam mentransformasi skala ordinal menjadi skala interval. Dengan demikian semua data yang telah dinaikkan dari skala ordinal ke interval ini dapat digunakan sebagai data input untuk analisis korelasi *pearson product moment.* Langkah-langkah transformasi data ordinal ke data interval adalah sebagai berikut :

1. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan
2. Pada setiap butir ditentukan dihitung masing-masing frekuensi jawaban responden
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi
4. Menentukan proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor
5. Menggunakan Tabel Distribusi Normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh
6. Menentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh (dengan menggunakan Tabel Tinggi Densitas)
7. Menentukan skala dengan menggunakan rumus:

$$NS = \frac{\text{(Density at Lower Limit) - (Density at Upper Limit)}}{\text{(Area Below Upper Limit) – (Area Below Lower Limit)}}$$

Dimana :

Density at Lower Limit = kepadatan batas bawah
Density at Upper Limit = kepadatan batas atas
Area Below Upper Limit = daerah dibawah batas atas
Area Below Lower Limit = daerah dibawah batas bawah

8. Menentukan nilai transformasi dengan rumus :

$$[NS + |NS_{min}| + 1] = Y$$

Proses pentransformasian data ordinal menjadi data interval dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer yaitu *Microsoft Office Excel 2007 (Analize)*

Rancangan analisis dalam penelitian ini menggunakan:

a. Analisis Korelasi Pearson *Product Moment*

Analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan untuk menyatakan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat , maka digunakan korelasi. Korelasi menurut (Jonathan Sarwono,2006: 37) adalah sebagai berikut:

"Korelasi digunakan untuk melihat kuat lemahnya hubungan antara variabel bebas dan tergantung" .

Rumus dari analisis *Korelasi Product Moment* adalah:

$$r = \frac{n\left(\sum XY\right) - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{\sqrt{\left\{n\left(\sum X^2\right) - \left(\sum X\right)^2\right\}\left\{n\left(\sum Y^2\right) - \left(\sum Y\right)^2\right\}}}$$

Sumber: Sugiyono, 2008

Keterangan :
r = Koefisien korelasi
X = komite audit
Y = prinsip-prinsip GCG
n = Banyaknya sampel

b. Analisis Regresi Linier Sederhana

Pada penelitan ini digunakan analisis regresi untuk mengetahui adanya peran antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengertian analisis regresi menurut (Jonathan Sarwono,2006: 65) adalah sebagai berikut:

"Analisis regresi adalah analisis yang meliputi metode-metode yang digunakan untuk memprediksi nilai-nilai dari satu atau lebih variabel tergantung yang dihasilkan adanya pengaruh satu atau lebih variabel bebas".

Penulis juga akan melakukan uji statistik analisis regresi untuk mengetahui ada atau tidaknya peran antara variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana nilai a dan b dicari terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$a = \frac{\left(\sum X^2\right)\left(\sum Y\right) - \left(\sum X\right)\left(\sum XY\right)}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$b = \frac{n\sum XY - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

Keterangan :

X : Profesi Auditor Internal
Y : Efektifitas Pengendalian Intern
a : Nilai Konstan
b : Angka Arah / Koefisien Regresi
n : Banyaknya Sampel

c. Koefisien Determinasi

Besarnya peran variabel X terhadap variabel Y dapat diketahui dengan menggunakan analisis koefisien determinasi atau disingkat Kd, yang diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasinya yaitu :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Sugiyono, 2008

Keterangan :
Kd = Nilai koefisien determinasi
r = Koefisien *korelasi product moment*
100% = Pengali yang menyatakan dalam persentase

3.2.4.1 Uji Validitas

Apabila nilai koefisien korelasi butir *item* pernyataan yang diuji lebih besar dari 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa *item* pernyataan tersebut merupakan konstruksi *(construct)* yang valid.

3.2.4.2 Uji Reliabilitas

Teknik yang digunakan untuk menguji keandalan kuesioner pada penelitian ini adalah metode *split-half* dari *Spearman-Brown*

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

6.2.5.2 Uji Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana peran suatu variabel terhadap variabel lainnya, yaitu peran komite audit dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG-. langkah-langkah pengujian hipotesis yaitu sebagai berikut :

1. Menentukan variabel pengukuran
   Variabel X = Komite Audit
   Variabel Y = Prinsip-prinsip GCG
2. Menentukan hipotesis nol (Ho)
   Ho : $\beta = 0$ Komite audit tidak berperan secara signifikan terhadap Prinsip-prinsip GCG.

3. Menentukan hipotesis alternatif (Hi)

Hi : $\beta \neq 0$ Komite audit berperan secara signifikan terhadap Prinsip-prinsip GCG.

4. Menguji tingkat signifikan

Untuk menguji signifikansi suatu koefisien *Korelasi Product Moment* menggunakan uji t dengan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiyono, 2008

Keterangan :
t : Nilai uji t
r : Koefisien *Korelasi Product Moment*
n : Jumlah sampel

Nilai t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan tingkat kepercayaan dengan taraf nyata α = 0,05 uji dua pihak dan dari hipotesis yang telah ditetapkan tersebut akan diuji berdasarkan daerah penerimaan dan daerah penolakan yang ditetapkan sebagai berikut :

- jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, H_1 ditolak berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada hubungannya.
- Jika $t_{hitung} \leq t_{table}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Peran Komite Audit Pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Peran komite audit

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Kondisi keuangan perusahaan	107	150	71,3%	Baik
2	Hasil usaha perusahaan	103	150	68,7%	Baik
3	Rencana dan komitmen jangka panjang	97	150	64,7%	Cukup
	Laporan Keuangan	**307**	**450**	**68,2%**	**Baik**
4	Menilai kebijakan	103	150	68,7%	Baik
5	Memonitor proses pengendalian	105	150	70,0%	Baik
6	Memeriksa kasus-kasus penting	100	150	66,7%	Cukup
7	Memeriksa laporan	92	150	61,3%	Cukup
	Corporate Governance	**400**	**600**	**66,7%**	**Cukup**
8	Pemahaman tentang resiko	104	150	69,3%	Baik
9	Sistem pengendalian intern	104	150	69,3%	Baik
10	Pemantauan proses pengawasan	103	150	68,7%	Baik
	Pengawasan Perusahaan	**311**	**450**	**69,1%**	**Baik**
	Total	**1018**	**1500**	**67,9%**	**Cukup**

4.2.2 Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Tabel 4.9

Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Pada Variabel Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Menyediakan informasi	102	150	68,0%	Cukup
2	Kebijakan perusahaan harus tertulis	102	150	68,0%	Cukup
3	Prinsip keterbukaan	103	150	68,7%	Baik
	Transparansi	**307**	**450**	**68,2%**	**Baik**
4	Mempunyai kompetensi	101	150	67,3%	Cukup
5	Sisitem pengendalian internal	100	150	66,7%	Cukup
6	Memiliki ukuran kinerja	103	150	68,7%	Baik
	Akuntabilitas	**304**	**450**	**67,6%**	Cukup
7	Kepatuhan	101	150	67,3%	Cukup
8	Tanggungjawab sosial	107	150	71,3%	Baik
9	Melindungi pemegang saham dan *stakeholders*	91	150	60,7%	Cukup
	Responsibilitas	**299**	**450**	**66,4%**	Cukup
10	Profesional	104	150	69,3%	Baik
11	Benturan kepentingan dan pengaruh	100	150	66,7%	Cukup
12	Melaksanakan fungsi dan tugas	104	150	69,3%	Baik
	Independensi	**308**	**450**	**68,4%**	Baik
13	Memberikan kesempatan	99	150	66,0%	Cukup
14	Perlakuan setara dan wajar	105	150	70,0%	Baik
15	Hak-hak karyawan	102	150	68,0%	Cukup
	Kewajaran	**306**	**450**	**68,0%**	Cukup
	Total	**1524**	**2250**	**67,73%**	Cukup

4.2.3.1 Analisis Korelasi

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\left[\left(n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2\right) \times \left(n\sum Y^2 - \left(\sum Y\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{30 \times 28991{,}863 - \left(628{,}597 \times 1344{,}299\right)}{\sqrt{\left[\left(30 \times \left(13899{,}508\right) - \left(628{,}597\right)^2\right) \times \left(30 \times \left(61955{,}809\right) - \left(1344{,}299\right)^2\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{869755{,}900 - 845022{,}319}{\sqrt{\left[\left(416985{,}251 - 395134{,}188\right) \times \left(1858674{,}266 - 1807139{,}801\right)\right]}}$$

$$r_{XY} = \frac{24733{,}581}{\sqrt{21851{,}063 \times 51534{,}465}}$$

$$r_{XY} = \frac{24733{,}581}{33557{,}157}$$

$$r_{XY} = 0{,}737$$

4.2.3.2 Analisis Regressi

Konstanta (a)

$$a = \frac{\sum X^2 \sum Y - \sum X \sum XY}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$a = \frac{(13899,508)\times(1344,299) - (628,597\times 1344,299)}{30\times(13899,508) - (628,597)^2}$$

$$a = \frac{18685095,196 - 18224198,310}{416985,251 - 395134,188}$$

$$a = \frac{460896,886}{21851,063}$$

a = 21,093

Koefisien regressi variabel X (b)

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - \left(\sum X\right)^2}$$

$$b = \frac{30\times(28991,863) - (628,597\times 1344,299)}{30\times(13899,508) - (628,597)^2}$$

$$b = \frac{869755,900 - 845022,319}{416985,251 - 395134,188}$$

$$b = \frac{24733,581}{21851,063}$$

b = 1,132

4.2.3.3 Koefisien Determinasi

KD = $(0,737)^2$ x 100% = 54,3%

4.2.3.4 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\rho = 0$	Komite audit (X) tidak berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Y) pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)
Ha: $\rho \neq 0$	Komite audit (X) berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*(Y) pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Penolakan dan penerimaan Ho didasarkan pada nilai statistik uji t dan nilai signifikansi. Apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (2,048) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Selanjutnya Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$t_{hitung} = r_{xy} \times \sqrt{\frac{n-2}{1-\left(r_{xy}\right)^2}}$$

$$t_{hitung} = 0,737 \times \sqrt{\frac{30-2}{1-(0,737)^2}}$$

$$t_{hitung} = 5,770$$

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin mengajukan dan memberikan saran yang sekiranya dianggap perlu dan dapat dipertimbangkan sebagai masukan bagi Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Komite Audit PT Dirgantara Indonesia (Persero), saran-saran tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan peran komite audit PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang sudah dianggap cukup, diharapkan komite audit PT Dirgantara Indonesia (Persero) untuk lebih melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan dan tata kelola perusahaan, serta melakukan pengawasan terhadap perusahaan supaya tidak terjadi lagi perbedaan pandangan yang menyebabkan keterlambatan dalam melakukan pertimbangan keputusan.
2. Untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup baik diharapkan peran dari komite audit untuk lebih meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam hal transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran supaya tata kelola perusahaan menjadi lebih baik.
3. Untuk meningkatkan peran komite audit dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance*, maka komite audit tidak boleh terlepas dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang merupakan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Karena dengan meningkatkan peran komite audit dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, maka akan berdampak baik terhadap tata kelola perusahaan dan para pemodal akan mau menanamkan modalnya di perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Mas Achmad Daniri. 2005. Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia. Ray Indonesia. Jakarta. Mas Achmad Daniri. 2005. *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia. Jakarta.

Moh. Wahyudin Zarkasyi, 2008. *Pedoman Praktis Bagi: Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Auditor Internal, Auditor Independen, Sekretaris Korporas*i. Alfabeta: Bandung.

Keputusan Mentri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP.117/M-MBU/2002 Pasal 3 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance*.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

Surat Edaran Direksi BEJ Nomor: KEP.339/BEJ/07-2001 tentang BUMN/BUMD wajib memiliki Komite Audit.